

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan atas aset biologi (*biological asset*) maupun hasil pertanian (*agriculture*) telah menjadi topik yang cukup lama dibahas dan masih hangat diperbincangkan hingga saat ini. Hal tersebut dikarenakan masih adanya pertentangan tentang metode pengukuran yang tepat atas jenis aset ini karena karakteristiknya unik dan berbeda bila dibandingkan dengan jenis aset tidak lancar lainnya. Dalam PSAK 58 dan PSAK 16, jenis aset yang dibahas terkait dengan aktivitas pertanian yaitu aset biologi, produk pertanian yang dihasilkan saat panen, maupun *government grants*.

Peningkatan permintaan global akan produk agrikultur (pertanian), seiring dengan pertumbuhan populasi di Indonesia yakni sebesar 1.8% per tahun (Harianto, 2012); industri agrikultur akan memainkan peran kunci yang terus berkembang di dalam perekonomian negara. Sektor ini akan mencakup industri agrikultur secara mendalam, meliputi seluruh aneka produk agrikultur dari kelapa sawit, biji cokelat, teh, kopi, tebu hingga budidaya hasil laut (Dinansyah, 2011).

Perkembangan usaha agrikultur yang semakin pesat sering kali didefinisikan sebagai transformasi biologis tanaman dan hewan untuk menghasilkan produk yang siap dikonsumsi atau yang masih membutuhkan proses lebih lanjut. Sesuai dengan "Research on Information Disclosure of

Biological Assets of Agricultural Listed Company In China” yang menjelaskan bahwa perlakuan akuntansi atas aset biologi sebagai dasar fundamental yang memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan guna menghasilkan keputusan yang tepat (Tang, Wan et al, 2013).

Perlakuan akuntansi terhadap aset biologi merupakan suatu hal yang penting karena selama masa pertumbuhannya mengalami akresi (Suwardjono,2008). Pengalokasian biaya selama proses pertumbuhan dalam jumlah cukup besar akan menyebabkan kesalahan dalam nilai aset biologi atau pertanian, karena industri agrikultur merupakan aspek yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara berkembang.

IAI berupaya menetapkan suatu standar laporan keuangan yang lebih terarah pada bidang agrikultur. IAI dalam Buletin Teknis No.3 menyatakan bahwa dasar dari definisi nilai wajar adalah asumsi bahwa entitas merupakan unit yang akan beroperasi selamanya tanpa adanya keinginan untuk melikuidasi, untuk membatasi secara material skala operasinya atau transaksi dengan persyaratan yang merugikan. Dengan demikian, nilai wajar bukanlah nilai yang akan diterima atau dibayarkan entitas dalam suatu transaksi yang dipaksakan, likuidasi yang dipaksakan, atau penjualan akibat kesulitan keuangan.

Nilai wajar menyampaikan informasi tentang nilai kekayaan dan kepengurusan manajemen dengan menyatakan semua aset dan kewajiban pada neraca sebagai nilai kepada pemegang saham. Sebagaimana IAI memutuskan

bahwa penerapan PSAK 68 ( Pengukuran Nilai Wajar ) akan berlaku efektif 1 Januari 2016 secara komprehensif.

Pengukuran merupakan penentuan nilai yang sangat penting dalam pelaporan aset maupun sumber keuangan perusahaan. Pilihan yang terkait pengukuran aset didasarkan pada pengaruh yang signifikan untuk pembuatan keputusan yang lebih baik bagi investor, kreditor, pemasok dan pekerja serta pihak lain yang berkepentingan, karena kunci dari keputusan ini akan memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan (Bouvier, 2013).

Perkembangan yang pesat dalam pemetaan permintaan dan penawaran perspektif global memungkinkan peluang investasi di sektor agrikultur ini terus berdaya saing pesat dan berdampak pada ketertarikan investor asing menanamkan modalnya pada industri agrikultur ini, sehingga konsekuensi yang harus dihadapi oleh perusahaan Indonesia adalah kesanggupan menyediakan informasi akuntansi yang memadai, informatif, terstandar, relevan dan reliabel sehingga berguna bagi pengambilan keputusan yang tepat.

Sesuai dengan sejarah IAS 41 sejak diterbitkan pada tahun 2000, pertama kali diaplikasikan pada periode 1 Januari 2003 dan tahun 2009 mengalami amandemen yang merujuk pada IFRS, hingga efektif mulai diimplementasikan sebelum atau setelah 1 Januari 2016 secara komprehensif dan telah mengalami perubahan yang spesifik pada produk agrikultur di Indonesia.

PSAK sebagai standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh IAI berbeda dengan IAS sebagai standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh

IASB, tetapi PSAK mengadopsi standar akuntansi dari FASB yang saat ini telah mengarah ke IFRS. Sehingga, IAS nantinya digantikan dengan IFRS.

Penetapan IFRS sebagai standar internasional dalam pelaporan bertujuan untuk memudahkan penulisan dan pelaporan keuangan bagi investor. Dengan adanya standar yang berlaku global mengakibatkan perusahaan tidak perlu mengganti standar pelaporan mereka agar dimnegerti oleh investor berbagai negara. Dengan standar internasional juga mengurangi biaya yang timbul akibat konvergensi (penyesuaian) laporan keuangan yang dibuat.

Standar yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi bisnis di Indonesia dalam membuat laporan keuangan adalah PSAK. Sekarang ini dengan adanya perkembangan IFRS sebagai standar baru mengakibatkan diadopsinya standar IFRS ke PSAK.

Adopsi ini tidak dilakukan secara langsung namun bertahap, sehingga adopsi bertahap ini akan memunculkan beberapa perbedaan dalam IFRS dan PSAK. Dengan adanya perbedaan kedua standar tersebut tidak berarti IFRS tidak berlaku di Indonesia atau sebaliknya, akan tetapi standar yang tetap berlaku di Indonesia adalah PSAK, sehingga pelaporan keuangan tetap mengikuti standar ini (Ikatan Akuntan Indonesia : 2010).

Terdapat 3 tahapan dalam melakukan konvergensi IFRS ke dalam PSAK di Indonesia, yaitu:

1. Tahap Adopsi (2008 – 2011), meliputi aktivitas dimana seluruh IFRS diadopsi ke PSAK, persiapan infrastruktur yang diperlukan, dan evaluasi terhadap PSAK yang berlaku.
2. Tahap Persiapan Akhir (2011), dalam tahap ini dilakukan penyelesaian terhadap persiapan infrastruktur yang diperlukan. Selanjutnya, dilakukan penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS.
3. Tahap Implementasi (2012), berhubungan dengan aktivitas penerapan PSAK IFRS secara bertahap, kemudian dilakukan evaluasi terhadap dampak penerapan PSAK keseluruhan.

IFRS juga menerapkan empat basis pengukuran yang lazim, yaitu biaya perolehan, biaya kini, nilai realisasi dan nilai sekarang. Namun, memasuki decade 2000-an, secara perlahan IFRS mulai meninggalkan basis biaya perolehan yang dianggap tidak relevan lagi, dan mulai mengadopsi nilai wajar (Purba,2010 : 35).

Seiring dengan ditinggalkannya basis harga perolehan, kini IFRS mengatur pengukuran aset biologi dengan nilai wajar dimana penilai dapat menerapkan tiga pendekatan sebagai berikut: Pendekatan Pasar, Pendekatan Biaya dan Pendekatan pendapatan (Supriyanto,2010).

Kieso (2012 : 51), mendefinisikan nilai wajar sebagai berikut : “Fair value is defined as the amount for which an asset could be exchange, a liability settled, or an equity instrument granted could be exchanged, between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction (PSAK 10)”. Pada perkembangannya, IFRS banyak mengadopsi nilai wajar yang menggunakan nilai

realisasi dan nilai kini. Nilai wajar adalah suatu basis yang dianggap lebih independen dan tidak memihak.

Sejarah penyusunan standar akuntansi di dunia kurang begitu memperhatikan usaha di bidang agrikultur. Hal ini mungkin dapat dimaklumi, mengingat dua negara adidaya seperti US dan UK sebagai dua negara penyusun standar akuntansi internasional, perekonomiannya sangat kecil dipengaruhi oleh sektor agrikultur. Namun seiring berjalannya waktu, dengan melihat perkembangan yang pesat di bidang ini, *IASC ( International Accounting Standar Committee )* yang kemudian melakukan restrukturisasi kelembagaan dengan membentuk *IASB ( International Accounting Standar Board )* yang merupakan dewan yang melahirkan standar pelaporan akuntansi internasional ( *IFRS* ), perlu mendesain secara khusus melalui IAS 41 untuk mempresentasikan penerapan pelaporan keuangan bagi perusahaan perusahaan yang bergerak di bidang agrikultur (Fischer,2013).

Setiap entitas atau perusahaan yang sebelumnya telah mengukur aset biologi pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual harus melanjutkan mengukur aset biologi tersebut pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual sampai aset tersebut ditukar. Implementasi IAS 41 yang dirasakan masih sulit bagi perusahaan dibuktikan oleh beberapa hasil penelitian, salah satunya berdasarkan penelitian yang dilakukan di Prancis, Australia, dan Inggris ditemukan bahwa pengukuran aset biologi berbasis biaya perolehan masih digunakan secara luas, survey yang dilakukan memberikan hasil bahwa pengukuran aset biologi menggunakan nilai

wajar jauh lebih besar biayanya dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh (*Elad and Herbohn, 2011*).

IAS 41 tentang aset biologi menyatakan bahwa aset biologi harus dinilai pada saat pengakuan awal dan pada setiap tanggal neraca dengan menggunakan nilai wajar. Hasil yang diperoleh dari aset biologi dinilai dengan menggunakan nilai wajar dikurangi dengan estimasi biaya pada saat penjualan, selisih yang berasal dari penilaian hasil penjualan. Hasil – hasil aset biologi diakui sebagai bagian dari laba rugi tahun berjalan.

Penilaian aset biologi dilakukan dengan mengelompokkan terlebih dahulu berdasarkan umur dan kualitas. Saat ini, penggunaan Standar Akuntansi Internasional telah diterapkan pada praktek akuntansi internasional pada IFRS. Namun, masih terdapat pro kontra karena masih ada ketidakpastian dalam pengukuran nilai wajar yang disyaratkan oleh IFRS, bermacam – macam metode pengukuran yang berbeda satu sama lainnya dan perusahaan masih mengalami berbagai kesulitan dalam mengimplemetasikan nilai wajar .

Hingga memasuki tahap ketiga proses konvergensi PSAK ke IFRS tahun 2012, IAS 41 masih mengandung perdebatan dalm hal penerapan metode pengukuran nilai wajar yakni dengan menggunakan metode harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Sampai saat ini, aset biologi merupakan aset yang tidak dikecualikan dari PSAK 16 (2011) Aset Tetap. Namun hal tersebut masih menimbulkan permasalahan mengingat tidak semua aset biologi mengalami penyusutan dan mengalami transformasi biologis.



Fakta tersebut mendorong peneliti melakukan penelitian ke objek yakni perusahaan yang memiliki aset biologi berupa tanaman hidup utama yaitu tanaman tebu. PT. PG. Candi Baru Sidoarjo adalah perusahaan BUMN ( RNI Group ) yang bergerak di sektor agrikultur dimana produk utamanya berupa gula. Aktiva tanaman tebu yang dimiliki oleh perusahaan ini memiliki proses pertumbuhan yang merupakan aktivitas agrikultur, yang mana aktivitas tersebut digolongkan dalam aset biologi.

Laporan keuangan yang disajikan oleh PT. PG Candi Baru Sidoarjo akan digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan harus disajikan secara wajar yang diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan manajemen, investor dan semua pihak yang berkepentingan. Untuk itu, diperlukan adanya penerapan standar yang sesuai dalam hal pengukuran nilai wajar atas aktiva biologi tebu sehingga laporan keuangan yang berkualitas, handal dan dapat diperbandingkan bisa tercapai. Selama ini, perusahaan di Indonesia belum mengimplementasikan aturan PSAK 68, karena masih banyak kendala dalam pengimplementasiannya terutama dalam hal pengukuran nilai wajar aset biologinya.

PT. PG Candi Baru ini sebagai studi kasus yang tepat untuk penerapan nilai wajar, karena di tahun 2011, perusahaan masih menggunakan harga perolehan, dan mulai 2012 hingga seterusnya perusahaan telah mengaplikasikan nilai wajar sehingga bisa dijadikan acuan perbandingan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan judul “Pengukuran nilai wajar aset biologi atas tanaman tebu pada PT. PG Candi Baru Sidoarjo ( RNI Group )”.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut : “Bagaimana pengukuran nilai wajar aset biologi atas tanaman tebu pada PT. PG Candi Baru Sidoarjo (RNI Group) ?”

## **1.3 Tujuan penelitian**

Mengetahui bagaimana pengukuran nilai wajar aset biologi atas tanaman tebu pada PT. PG Candi Baru Sidoarjo (RNI Group).

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Bagi perusahaan, secara spesifik pengukuran nilai wajar ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbandingan pelaporan keuangan dalam laporan konsolidasi PT.RNI, dikarenakan nilai wajar mencerminkan nilai dari aset tetap saat pelaporan yakni menampilkan nilai yang sesungguhnya dari entitas pada saat pelaporan, bukan nilai masa lalunya pada saat pelaporan. Dari segi laporan keuangan dan laba rugi yang juga memiliki angka pencapaian terus meningkat dari tahun sebelumnya, pencapaian kinerja perusahaan yang semakin membaik, dengan ditunjukkan rasio keuangan dan anggaran produksi yang makin meningkat.

Hasil dari rendemen yang makin besar, sehingga gula yang diproduksi makin berlimpah sehingga kebijakan harga atas tanaman tebu mencapai kesepakatan nilai wajar bagi perusahaan, pemerintah maupun petani. Selain itu, bagi IAI untuk

terus melakukan pengawasan atas penetapan nilai wajar yang digunakan oleh perusahaan terutama di bidang agro industri.

### **1.5 Sistematika Skripsi**

Penulisan dalam skripsi ini dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut :

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini terdiri dari empat sub bab, yaitu : (1) latar belakang tentang perlunya pengukuran nilai wajar aset biologi berupa aset agrikultur atas tanaman tebu (2) dari latar belakang tersebut maka ditarik suatu perumusan masalah (3) Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, dan (4) Manfaat penelitian secara keseluruhan.

#### **BAB 2 : Tinjauan Pustaka**

Bab ini menguraikan landasan teori terkait masalah yang diteliti dan pendapat – pendapat ahli yang berkaitan dengan pengukuran nilai wajar aset biologi berdasarkan IAS 41. Semua landasan teori dan pendapat – pendapat ahli diperoleh dari literatur – literatur kuliah, jurnal jurnal internasional, serta buku – buku yang berkaitan dengan topik penulisan skripsi ini. Bab ini diakhiri dengan penelitian sebelumnya sebagai referensi dan acuan pembanding untuk melihat garis besar persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini serta mengaitkannya dengan kerangka teori.

### **BAB 3 : Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang dibuat, jenis dan sumber data yang akan diteliti dan diolah lebih lanjut, prosedur pengumpulan data serta teknik analisis yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan literatur dari Moleong dimana penulis melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian, tidak menggunakan alat bantu statistik dalam menganalisis data, serta menghubungkan hasil penelitian dengan konsep dan teori yang mendasari, sedangkan rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan studi kasus dengan literatur dari Yin, dimana sesuai dengan rumusan masalah yang dimulai dengan pertanyaan “Bagaimana”.

### **BAB 4 : Hasil dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan tiga hal yaitu , (1) Gambaran umum perusahaan (2) Hasil analisis penelitian (3) Interpretasi terhadap masalah yang dirumuskan berdasarkan landasan teori.

### **BAB 5 : Simpulan dan Saran**

Bab ini menguraikan simpulan yang dapat ditarik dari pembahasan masalah penelitian serta saran – saran yang diharapkan berguna bagi pihak – pihak yang berkepentingan seperti : perusahaan dan juga IAI.